

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Isu AAPI *hate* telah meningkat sejak tahun 2019 dimana pandemi COVID-19 mulai mempengaruhi keadaan sosial ekonomi masyarakat Amerika. Komunitas AAPI terus mendapatkan aksi diskriminasi yang mengganggu kesejahteraan dan keberlangsungan hidup dari komunitas AAPI sebagai masyarakat. Lahirnya *Stop AAPI Hate* sebagai gerakan sosial menjadi respon atas isu AAPI *hate* yang tumbuh dari keinginan masyarakat untuk bersuara. Gerakan *Stop AAPI Hate* melihat minimnya respon dan aksi pemerintah pada era Donald Trump yang justru kerap menggunakan istilah yang menyinggung komunitas AAPI dalam memberikan pernyataan atas isu pandemi yang mengakibatkan rasa takut dan meningkatnya *xenophobia* di masyarakat.

Gerakan tersebut menjadi penunjang data yang selama ini kurang tersinkronisasi dengan baik antara *Department of Justice* dengan aparat kepolisian di tingkat negara bagian dan lokal. Data yang diperoleh melalui peningkatan koordinasi dengan masyarakat AAPI itu sendiri dan mendorong setiap individu untuk berani bersuara tentang apa yang telah dialami selama berlangsungnya isu AAPI *hate*. Data ini kemudian menjadi salah satu hal terpenting yang mengarah kepada solusi yang dapat menangani isu AAPI *hate* yakni berupa hukum baru dari pemerintah di masa kepemimpinan Joe Biden.

Hukum baru yakni COVID 19 *Hate Crimes Act* berhasil melalui proses yang dilakukan dalam kongres dan mendapatkan persetujuan senat untuk kemudian

disahkan oleh presiden Joe Biden untuk ditetapkan sebagai hukum yang berlaku mulai Mei 2021. Ketentuan dari hukum ini meningkatkan performa pemerintah sebagai pelayan publik yang memiliki kewajiban untuk mendistribusikan bantuan dan menciptakan program atau kebijakan yang dapat menguntungkan masyarakat. Ketentuan dari hukum ini menggerakkan DOJ sebagai lembaga pusat pemerintahan untuk mendorong proses laporan yang akan menjadi kajian data untuk menciptakan adanya solusi serta aksi pencegahan bagi isu AAPI *hate*. Ketentuan dalam hukum ini berhasil menyempurnakan alur pelaporan kasus *hate crime* dan *hate incident* yang menjadi tantangan sebelumnya untuk mengatasi isu AAPI *hate*. Selain itu, pemerintah juga mendorong kampanye dan edukasi yang lebih inklusif bagi komunitas AAPI. Dengan menggunakan pendekatan multilingualistik, pemerintah menargetkan materi edukasi dan kampanye yang dapat menjangkau seluruh komunitas AAPI yang memiliki latar belakang kebangsaan, bahasa, dan budaya yang berbeda. Dengan ini masyarakat akan menimbulkan kepercayaan lebih kepada pemerintah, khususnya komunitas AAPI, yang akan mempermudah proses distribusi bantuan dan pencarian solusi yang dapat mengakhiri AAPI *hate* hingga ke akarnya. Pemerintah juga melakukan alokasi sumber daya yang akan menyesuaikan kebutuhan masyarakat AAPI untuk menciptakan kesejahteraan dan jaminan hidup yang lebih baik secara berkelanjutan dari aspek sosio-ekonomi. Alokasi sumber daya akan diarahkan berdasarkan komisi baru yang dibentuk oleh presiden Biden secara langsung dalam *Department of Health and Human Services* yang dibentuk secara khusus untuk menjadi penasihat presiden Biden dalam mendistribusikan sumber daya yang tepat komunitas AAPI agar dapat bangkit dari

keterpurukan akibat isu AAPI *hate*. Ketentuan dari hukum ini juga memperbaiki hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dengan organisasi-organisasi yang mendukung kesejahteraan dan keamanan komunitas AAPI seperti *Stop AAPI Hate*.

4.2 Saran

Penelitian ini menjelaskan bagaimana gerakan sosial *Stop AAPI Hate* menciptakan dampak dalam sistem pemerintah untuk mengarah kepada *social equity* melalui adanya hukum COVID 19 *Hate Crimes Act* di tahun 2019 – 2021, oleh karena itu penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat memfokuskan upaya berkelanjutan dari *Stop AAPI Hate* untuk mempertahankan dan memastikan kesejahteraan dan keamanan komunitas AAPI setelah adanya hukum COVID 19 *Hate Crimes Act*.